



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PIDATO PENUTUPAN
MASA PERSIDANGAN PERTAMA TAHUN SIDANG 2021/2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

DISAMPAIKAN OLEH : H. SUKIRMAN, SS

Yth. Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang Kami hormati segenap jajaran OPD Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, wartawan, dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2021/2022.

Masa Persidangan Pertama telah berlangsung sejak tanggal 3 September 2021 dan akan berakhir pada hari ini. Walaupun awal persidangan dilakukan di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, DPRD Provinsi Jawa Tengah telah dapat mengefektifkan pelaksanaan fungsi dan tugas konstitusionalnya dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Mengawali pidato penutupan Masa Persidangan ini, atas nama Pimpinan DPRD dan segenap Anggota DPRD, kami menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Berapi Semeru di Jawa Timur. Semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah

SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan diberikan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2021 ini, DPRD Jawa Tengah telah melaksanakan sejumlah agenda strategis yang telah diselesaikan melalui pelaksanaan **Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran, Dan Fungsi Pengawasan.**

Sesuai dengan amanat Pasal 5, Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah, baik **Fungsi Anggaran, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah.** Beberapa hal yang telah dilaksanakan diantaranya:

A. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, pada Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2021/2022 ini, DPRD (Bapemperda) telah melakukan evaluasi atas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Raperda Tahun 2021. Terdapat 27 Raperda dalam Propemperda yang terdiri dari 3 Raperda Akumulatif Terbuka dan 24 Raperda usulan antara Eksekutif dan Legislatif. Dari 27 Raperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda sampai dengan Bulan Desember 2021, terdapat 11 Raperda yang telah mendapatkan persetujuan atau progress capaian kinerja 100%, dimana 10 Raperda telah ditetapkan pada Masa Persidangan Kedua dan Ketiga Tahun Sidang 2020/2021 dan 1 (satu) Raperda pada Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2021/2022, 6 (enam) Raperda Inisiatif DPRD capaian progress 90% dalam proses Fasilitasi Kementerian Dalam Negeri RI, 5 (lima) Raperda baik Inisiatif DPRD maupun Inisiatif Gubernur progress capaian kinerja 80%, 1 (satu) Raperda Inisiatif Gubernur capaian progress 10% dan 4 (empat) Raperda Inisiatif Gubernur belum disampaikan. Sebagaimana telah di uraikan

diatas maka Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2021 pada masa Persidangan Pertama ini sebagai berikut :

| No | Judul Raperda | Pengusul | Prosentase | Ket |
|-----|---|----------|------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1. | Penyelenggaraan Bantuan Hukum | DPRD | 90% | Proses Fasilitasi Kemendagri |
| 2. | Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Kebun Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura di Provinsi Jawa Tengah | DPRD | 90% | Proses Fasilitasi Kemendagri |
| 3. | Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah | DPRD | 80% | Proses Pembahasan Komisi |
| 4. | Pengelolaan Limbah Domestik Regional di Provinsi Jawa Tengah | DPRD | 90% | Proses Fasilitasi Kemendagri |
| 5. | Penyelenggaraan Pengarustamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah | DPRD | 90% | Proses Pembahasan Komisi |
| 6. | Pemberdayaan Organisasi Masyarakat | DPRD | 90% | Proses Fasilitasi Kemendagri |
| 7. | Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah | GUBERNUR | 0% | Belum disampaikan kepada DPRD |
| 8. | Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | GUBERNUR | 0% | Belum disampaikan kepada DPRD |
| 9. | Perubahan Bentuk Hukum PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah | GUBERNUR | 0% | Belum disampaikan kepada DPRD |
| 10. | Perubahan Bentuk Hukum PT. Penjamin Kredit Daerah Jawa Tengah. | GUBERNUR | 10% | Telah disampaikan ke DPRD |

| No | Judul Raperda | Pengusul | Prosentase | Ket |
|-----|--|-------------------|------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | |
| 11. | Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Jawa Tengah | GUBERNUR | 80% | Pembahasan oleh Pansus |
| 12. | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah | DPRD LANJUTAN | 90% | Proses Penyempurnaan hasil Fasilitasi |
| 13. | Perubahan Kedua Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah | GUBERNUR LANJUTAN | 100% | dilanjutkan |
| 14. | Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas | GUBERNUR LANJUTAN | 0% | Belum disampaikan kepada DPRD |
| 15. | Perubahan Perda Nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan perlindungan anak | GUBERNUR LANJUTAN | 90% | Proses Pembahasan Pansus |
| 16. | Perubahan Status PD Citra Mandiri Jawa Tengah | GUBERNUR LANJUTAN | 80% | Proses Pembahasan Pansus |
| 17. | Perlindungan Nelayan, Pemberdayaan Petambak Garam Dan Pengolah | GUBERNUR LANJUTAN | 80% | Proses Pembahasan Pansus |
| 18. | APBD Tahun Anggaran 2022 | Kumulatif Terbuka | 100% | Disetujui tgl 28 Oktober 2021 |

Dalam rangka menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, baik yang berasal dari usulan DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Alat Kelengkapan Dewan yaitu Komisi dan Badan Pembentukan Perda, maupun yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Tengah telah mengajukan Usul Prakarsa berupa Rancangan Perda sebagai berikut :

| No | Judul Raperda | Pengusul |
|----|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Penyelenggaraan Penyiaran | DPRD (Komisi A) |
| 2. | Tata Kelola dan Pemasaran Exsport Produk Pertanian, Peternakan, Perikanan dan UMKM Jawa Tengah | DPRD (Komisi B) |
| 3. | Pengelolaan Keuangan Daerah | DPRD (Komisi C) |
| 4. | Perubahan Atas Perda Prov. Jateng No. 20 Tahun | DPRD |

| No | Judul Raperda | Pengusul |
|-----|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah | (Komisi D) |
| 5. | Penyelenggaraan Ketenagakerjaan | DPRD (Komisi E) |
| 6. | Penanaman Modal Di Jawa Tengah | DPRD (Bapemperda) |
| 7. | Fasilitasi dan Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren Di Provinsi Jawa Tengah. | Gubernur |
| 8. | Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Gubernur |
| 9. | Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 | |
| 10. | Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 | |
| 11. | APBD Tahun Anggaran 2023 | |

B. Fungsi Anggaran

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPRD Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pembahasan, dan penetapan Raperda APBD Tahun 2022 menjadi Perda APBD Tahun 2022 yang disetujui dalam Rapat Paripurna pada Tanggal 28 Oktober 2021 dan telah melakukan Pembahasan Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Perda APBD Tahun Anggaran 2022 bersama TAPD pada Tanggal 13 Desember 2021. Badan Anggaran DPRD Bersama TAPD Gubernur telah melakukan pembahasan terhadap KUA PPAS dan Raperda APBD untuk tahun anggaran 2022, yang dilanjutkan pembahasan KUPA dan PPAS beserta Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. DPRD menyetujui kebijakan APBD 2022 yang akan dijalankan Pemerintah setahun mendatang dengan alokasi belanja daerah sebesar Rp. 24. 539.916.554.000.

DPRD Jawa Tengah mendorong Pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas belanja pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. APBD Tahun Anggaran 2022, agar responsif dalam menghadapi dinamika dan risiko pertumbuhan ekonomi pasca Pandemi Covid-19.

DPRD Jawa Tengah bersama Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam menghadapi risiko Pandemi Covid-19 dan terus melakukan perbaikan strategi dalam penanganan Covid-19 sehingga mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi.

C. Fungsi Pengawasan

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, melalui Alat Kelengkapan DPRD, pada Masa Persidangan Pertama, antara lain :

1. Memberikan atensi pada penanganan pandemi Covid-19 di berbagai bidang dan sektor. Komisi terkait akan memastikan bahwa regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, mitigasi bencana, serta pengelolaan dana penanggulangan pandemi Covid-19 berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD sudah membentuk Panitia Khusus Penanggulangan Covid-19, diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan penanganan covid-19 di Jawa Tengah.
2. Melakukan Rapat Kerja dengan OPD mitra dan melakukan kegiatan Kunjungan Kerja dalam dan Luar Daerah sebanyak 94 kali dengan rincian Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 37 kali dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 56 kali.
3. Hasil Rekomendasi terkait pelaksanaan kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Masa Persidangan pertama Tahun Sidang 2021/2022 adalah sebagai berikut :
 - a) Mendorong pengawasan terhadap pengelolaan Aset Provinsi Jawa Tengah di Masa Sidang selanjutnya;
 - b) Mendorong pengawasan terhadap implementasi peraturan daerah yang telah dihasilkan/ diundangkan, utamanya pengawalan terhadap amanat pembentukan peraturan pelaksanaan/ Peraturan Gubernur dengan perangkat daerah tersebut;

- c) melakukan optimalisasi rapat kerja komisi dengan perangkat daerah mitra komisi utamanya dalam perumusan program kegiatan dalam Rancangan RKPD serta persiapan pelaksanaan APBD;
 - d) mendorong pengawasan terhadap kinerja BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - e) Perumusan rancangan peraturan daerah inisiatif komisi yang terus mempertimbangkan kondisi/ masalah isu kekinian yang dapat diselesaikan salah satunya dengan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - f) Pemerataan kualitas pendidikan baik tenaga pendidik, sarana prasarana dan standard nasional pendidikan lainnya melalui kegiatan penyelenggaraan sistem zonasi;
 - g) Perlu adanya pendataan dan verifikasi terkait penyelenggaraan Bantuan Siswa Miskin (BSM) agar tepat sasaran dan menghindari terjadinya duplikasi data;
 - h) pelaksanaan kegiatan kepemudaan perlu ditingkatkan kolaborasi dan kemitraannya dengan melibatkan DPRD sebagai mitra agar bisa mengawal pembangunan kepemudaan baik dalam kegiatan di organisasi kepemudaan, penyelenggaraan pemuda pelopor / pemuda desa, dan pelibatan dalam kegiatan pramuka di Jawa Tengah.
4. Terkait dengan Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut dari LHP BPK, bahwa Komisi-Komisi telah melaksanakan kegiatan Kunjungan Kerja pada tanggal 22-23 November 2021, dengan hasil 14 Rekomendasi perubahan atau koreksi yang harus di tindaklanjuti oleh Gubernur.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Demikian kami sampaikan Pidato Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2021/2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

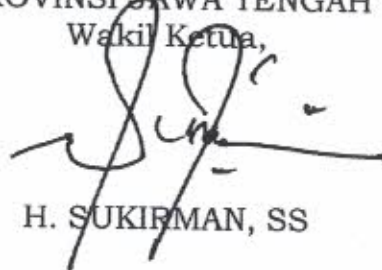
Dengan mengucapkan **Alhamdulillah** rabbillalamiin, saya atas nama Pimpinan DPRD mengumumkan kepada seluruh rakyat Jawa Tengah bahwa Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2021/2022, ditutup pada hari ini, Jum'at 31 Desember 2021 sampai dengan dibukanya masa sidang periode selanjutnya, dan kepada yang terhormat seluruh Anggota DPRD, kami menyampaikan **"Terima kasih yang sebesar-besarnya telah menjalankan tugas konstitusi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara dengan sebaik-baiknya."**

Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kemudahan dan meridhoi usaha-usaha luhur kita sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 31 Desember 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Ketua,



H. SUKIRMAN, SS